

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas mengenai mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Padang, maka dapat ditarik Kesimpulan :

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Padang dilakukan melalui beberapa tahap penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan sekaligus penatausahaan, penerapan standar biaya, serta proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tahap perencanaan menjadi pijakan utama, agar perjalanan dinas bisa berlangsung tertib dan sesuai tujuan, sementara dokumen seperti SPJ dan SPT berperan sebagai dasar hukum dalam kegiatan tersebut. Pada tahap penatausahaan, setiap dokumen pendukung dilampirkan secara lengkap untuk menjamin keterbukaan dan kejelasan penggunaan anggaran. Standar biaya yang diatur melalui peraturan daerah juga menjadi pedoman agar seluruh pengeluaran tercatat sesuai aturan. Selanjutnya, proses verifikasi memastikan laporan yang disusun akurat dan layak disahkan. Dengan alur kerja tersebut, penyusunan LPJ perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Padang telah mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta kedisiplinan administrasi, yang pada akhirnya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Padang pada dasarnya adalah wujud nyata dari tanggung jawab penggunaan anggaran publik. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa

setiap rupiah yang dipakai dalam kegiatan perjalanan dinas benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas. Laporan ini sekaligus menjadi alat kontrol agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalurnya dan terhindar dari penyimpangan. melalui LPJ, pimpinan dapat menilai apakah perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan rencana serta memberi manfaat sesuai kebutuhan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat apakah anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Fungsi lainnya adalah sebagai dasar hukum sekaligus bukti administratif bahwa kegiatan yang dibiayai oleh APBD memang benar dilaksanakan. Dengan adanya laporan tersebut, tata kelola administrasi keuangan daerah bisa berjalan lebih tertib. Lebih jauh, penyusunan LPJ juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa dana publik digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas memiliki arti penting dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

3. Penyusunan laporan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala terutama terkait dengan surat-menyurat serta pencocokan anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu hambatan yang sering ditemui adalah ketidaksesuaian antara laporan yang disusun dan anggaran yang sebenarnya digunakan, yang mengharuskan adanya pemeriksaan ulang dan koreksi data. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peninjauan yang cermat sebelum keberangkatan dinas agar seluruh informasi dan kebutuhan anggaran sudah sesuai sejak awal. Pemanfaatan aplikasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan, khususnya dalam mendukung pekerjaan bagian keuangan. Dengan sistem

yang lebih terintegrasi dan mudah diakses, diharapkan proses penyusunan laporan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan.

5.2 Saran

Berdasarkan jabaran pembahasan di atas tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada kantor Sekretariat DPRD Kota Padang, maka penulis memberi saran diantara :

1. Kantor DPRD Kota Padang diharapkan dapat lebih cermat dalam menyusun laporan, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap format yang telah ditetapkan. Ketelitian ini akan membantu mempercepat proses penyusunan laporan serta memastikan akurasi data yang disampaikan.
2. Penyusunan laporan setelah kegiatan perjalanan dinas sebaiknya terus dioptimalkan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Dengan pembekalan yang tepat, kualitas laporan diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mendukung efisiensi dalam proses pelaporan.
3. Kantor Sekretariat DPRD juga disarankan untuk melakukan pengembangan dan pembaruan pada sistem aplikasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Hal ini penting agar pencatatan dana lebih sesuai dengan kondisi riil, serta mengurangi potensi kesalahan saat dilakukan pemeriksaan akhir terhadap laporan.
4. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman serta kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas pelaporan. Upaya ini terbukti membawa perubahan positif yang terlihat dari peningkatan kualitas laporan dari tahun ke tahun. Melalui perbaikan berkelanjutan dan kolaborasi antarpihak, diharapkan proses penyusunan laporan

pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas ke depan dapat berjalan lebih baik dan profesional.

